



**MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA
KONSTRUKSI**

**(Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek
II *Elevated* periode tahun 2016-2017)**

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Hukum

Oleh:

WIJAYANTO HADIKUSUMA
NIM. 2320119013

Dosen Pembimbing:

- 1. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**
- 2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.**

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

HALAMAN JUDUL

**MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA
KONSTRUKSI**

**(Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design
and Build*) Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek
II Elevated periode tahun 2016-2017)**



1. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.
2. Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CL.

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2025**

MITIGASI RISIKO TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI

**(Studi Kasus Ketua Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan (*Design and Build*)
Pekerjaan Pembangunan Jalan Tol Jakarta – Cikampek II *Elevated* periode
tahun 2016-2017)**

(Wijayanto Hadikusuma, NIM. 2320119013, Program Studi Magister Hukum,
Fakultas Hukum Universitas Andalas)

ABSTRAK

Penerapan sanksi pidana terhadap pejabat pemerintah atau BUMN dalam proses pemilihan penyedia jasa pengadaan barang/jasa pemerintah (PBJP) menjadi isu krusial ketika penyimpangan prosedur dianggap sebagai tindak pidana korupsi, meskipun lebih tepat dikualifikasikan sebagai kesalahan administratif. Penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara tidak selalu disertai dengan unsur *mens rea* berat, namun dalam praktik peradilan hal tersebut kerap dijadikan dasar pemidanaan. Ketidakjelasan dalam membedakan antara pelanggaran administratif dan perbuatan pidana menciptakan ruang bagi kriminalisasi kebijakan, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum serta menghambat efektivitas penyelenggaraan PBJP, khususnya di sektor jasa konstruksi yang sarat dengan kompleksitas teknis dan regulatif. Permasalahan tersebut menjadi semakin signifikan dalam konteks sektor jasa konstruksi, yang merupakan salah satu sektor dengan risiko korupsi tertinggi dalam penyelenggaraan proyek pemerintah. Proyek infrastruktur berskala besar sering melibatkan proses pengadaan yang rumit, melibatkan banyak pihak, serta berpotensi membuka celah penyimpangan. Dalam studi kasus Ketua Panitia Pengadaan Proyek Jalan Tol Jakarta–Cikampek II *Elevated*, ditemukan bahwa sanksi pidana dijatuhkan meskipun tidak terdapat bukti kuat mengenai adanya *mens rea* berat. Temuan ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan antara hukum pidana dan hukum administrasi negara agar penerapan sanksi bersifat proporsional, berbasis kesalahan yang terukur, serta tidak menyimpang dari prinsip keadilan substantif. Dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana korupsi pada PBJP di sektor jasa konstruksi, diperlukan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga pada pencegahan yang sistemik. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meliputi digitalisasi proses pengadaan, penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kompetensi aparatur pengadaan, serta penerapan sistem pengawasan berbasis risiko. Selain itu, pemberian insentif yang adil dan proporsional terhadap beban tanggung jawab pejabat pengadaan merupakan elemen strategis dalam menciptakan iklim kerja yang menjunjung integritas dan akuntabilitas. Dengan demikian, reformasi tata kelola PBJP harus diarahkan pada terciptanya sistem yang mampu membedakan kesalahan administratif dari perbuatan pidana, serta menjamin perlindungan hukum bagi pejabat yang menjalankan tugas secara profesional..

Kata Kunci: Mitigasi Risiko, Tindak Pidana Korupsi, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sektor Jasa Konstruksi.

RISK MITIGATION OF THE CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION IN GOVERNMENT PROCUREMENT OF GOODS/SERVICES IN THE CONSTRUCTION SERVICES SECTOR

**(A Study on the Chairman of the Procurement Committee for the Design and
Build of the Jakarta - Cikampek II Elevated Toll Road, period of 2016-2017)**

(Wijayanto Hadikusuma, NIM. 2320119013, Master of Law, Faculty of Law,
Andalas University)

ABSTRACT

The imposition of criminal sanctions on government or state-owned enterprise (SOE) officials in the selection process of providers for public procurement of goods/services (PBJP) presents a critical issue when procedural irregularities are treated as corruption crimes, even though they may more appropriately fall under administrative violations. Abuse of authority that causes state financial loss is not always accompanied by elements of grave mens rea, yet in judicial practice, such actions are often criminalized. The lack of clear boundaries between administrative misconduct and criminal acts creates space for the criminalization of policy decisions, leading to legal uncertainty and weakening the effectiveness of PBJP implementation, particularly in the construction services sector, which is marked by complex technical and regulatory dimensions. This issue becomes increasingly relevant in the construction sector, one of the highest-risk sectors for corruption in government projects. Large-scale infrastructure initiatives often involve complicated procurement procedures, multiple stakeholders, and a high potential for irregularities. In the case study of the Chairman of the Procurement Committee for the Jakarta–Cikampek II Elevated Toll Road project, criminal sanctions were imposed despite the absence of compelling evidence indicating grave mens rea. These findings underscore the urgency of harmonizing policies between criminal law and administrative law to ensure that sanctions are proportionate, based on measurable culpability, and aligned with substantive principles of justice. Efforts to mitigate the risk of corruption in PBJP within the construction services sector require a holistic approach, emphasizing systemic prevention rather than merely punitive enforcement. Effective strategies include procurement digitalization, strengthening internal control systems, enhancing procurement officials' competencies, and implementing risk-based oversight mechanisms. Additionally, fair and proportionate incentives in accordance with procurement officials' responsibilities serve as strategic tools to promote integrity and accountability. Governance reform in PBJP must aim to establish a legal system that clearly distinguishes administrative errors from criminal offenses, while ensuring legal protection for professionals acting in good faith and within their mandates.

Keywords: Risk Mitigation, Corruption Crime, Public Procurement of Goods/Services, Construction Services Sector.